

# PENILAIAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN WONOGIRI

Iwan Ristanto<sup>1</sup>, Annisa Azhar Firdausi<sup>\*2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara dan Program Pascasarjana Doktor Ilmu Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: iwan.ristanto@yahoo.com

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Veteran Bangun Nusantara

\*Email: annisaazharf@gmail.com

## Abstract

*Developing Village Index (IDM) is an indicator tool developed based on the concept of the village development framework. This study examines the interaction between the use of Dana Desa (DD) for building village roads, bridges, and drainage systems. In Tirtomoyo District, IDM categorizes villages into two statuses: Developing Villages and Advanced Villages. The study analyzes how these statuses relate to village infrastructure development. The type of infrastructure factor (Factor 1) and the village status factor (IDM) (Factor 2) both have sig values.  $= 0.000 < \alpha = 0.050$  so it has an influential relationship with assessments at the planning, implementation and supervision stages of village development. The interaction between Factor 1 and Factor 2 has a sig value.  $= 0.000 < \alpha = 0.050$  so that these two factors influence each other on the assessment at the planning, implementation, and supervision stages of village development. The results of the assessment at the planning (RAB) and monitoring stages, developed villages have a higher assessment on 2 infrastructure (roads and bridges) and a smaller value on drainage infrastructure but the difference is not much compared to developing villages, but at the village implementation stage developed villages have a higher assessment of 3 infrastructure (drainage, roads, and bridges) compared to developing villages.*

**Key Words:** IDM, Village development, Village Infrastructure

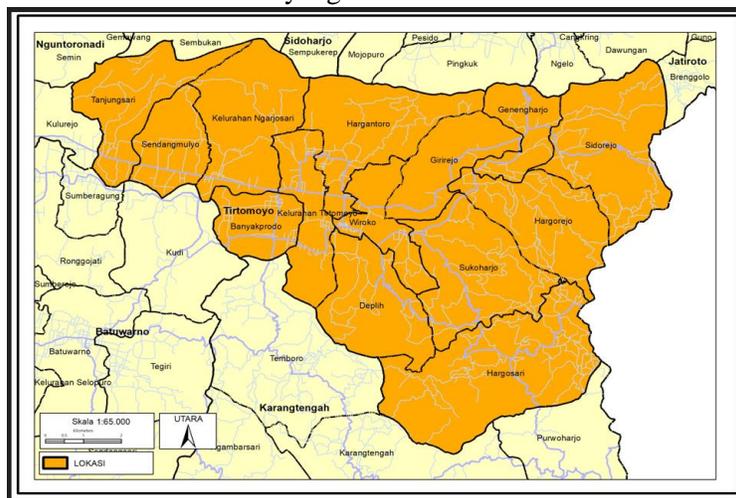
## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang menjalankan sistem otonomi daerah dimana pemerintah memberikan kewenangan pada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola daerah sesuai potensinya (Sari dan Zefri, 2019). Desa merupakan suatu bagian penting dari suatu negeri (Herdiana, 2019), yang diberi kewenangan untuk mengatur tata ruangnya sendiri beraskan hak asal usul dan kewenangan lokal dalam tingkat desa (Femilia dan Huda, 2020). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh

wilayah Indonesia (Subekan, 2020). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri. Dari tahun 2015, dua belas desa di Kecamatan Tirtomoyo telah melaksanakan amanat UU tersebut. Desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah telah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan di desa sehingga otonomi desa dapat terwujud, selain itu desa diharapkan dapat bertanggungjawab atas masalah keuangan mereka sendiri (Destifani dkk, 2013). Salah satu kewenangannya adalah mengurus Dana Desa (DD) dan mempertanggungjawabkannya.

Untuk menjalankan otonomi desa, pemerintah pusat memberikan bantuan kepada seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia yang biasa disebut dengan istilah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) langsung. Pemerintah berharap dengan adanya ADD ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat, selain itu administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan ADD juga diharapkan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak. Adanya tuntutan administrasi yang

bersifat wajib dan sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pengguna dana dan pemberi dana, pemerintah aparat desa harus dapat memahami tata kelola keuangan desa (Tambuwun dkk, 2018). Sejak tahun 2016, desa-desa di Kecamatan Tirtomoyo, telah mendapatkan kucuran Dana Desa (DD). Kecamatan Tirtomoyo merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah adalah 93,01 km<sup>2</sup>, dengan pembagian desa/kelurahan seperti pada Gambar 1, dimana dalam peta tersebut Kecamatan Tirtomoyo digabi menjadi 12 desa dan 2 kelurahan.



Gambar 1. Peta Desa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri

Pemerintah mengembangkan suatu metode pengukuran untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa di Indonesia yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM), dimana didalamnya terdapat matriks yang menggabungkan antara tiga aspek potensi yang dimiliki desa untuk menuju kesejahteraan desa, aspek-aspek tersebut adalah sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan. Jika tiga aspek tersebut digabungkan suatu desa akan memiliki ketahanan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi yang diukur dengan nilai IDM tadi. Suatu desa diharapkan dapat mengelola ketiga aspek yang dimilikinya untuk menuju desa maju dan mandiri. Pengelolaan sumber daya desa, melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa harus dirancang untuk pengembangan,

pembangunan, dan pemberdayaan desa yang harus mengutamakan asas pemerataan dan keadilan, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Artinya seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan merupakan potensi yang dimiliki desa harus dioptimalkan pengelolaannya agar dapat menopang kesejahteraan warga desa setempat (Kemendesa PDTT, 2023). Selain aspek tiga potensi tersebut harusnya IDM juga mempertimbangkan aspek penyelenggaraan pemerintah desa dan erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa (PAD), karena hal tersebut juga sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan desa. Suatu desa yang memiliki potensi yang baik, aparat pemerintah desa yang baik, tetapi memiliki

PAD rendah akan berdampak pada alokasi dana desa yang rendah, sehingga terdapat kecenderungan penurunan kinerja desa. Berkaca dari penyelenggaraan pemerintah desa, dengan dilakukannya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, seharusnya pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih tepat. Namun, masih dijumpai laporan yang melebihi batas waktu dan pelaksanaan yang tidak sesuai banyak ditemukan dari arsip dokumen. Menurut laporan pertanggungjawaban APBDesa, proyek pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan desa dan gedung seharusnya dapat menghemat

anggaran material, tetapi anggaran telah habis dan penggunaannya kurang efisien (Astika dan Subawa, 2021). Hal tersebut mengindikasikan penggunaan dana desa yang belum optimal.

Indeks Desa Membangun (IDM) sendiri dirumuskan dengan matrik khusus yang digunakan untuk mengukur sebuah desa apakah desa termasuk dalam kategori sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri, dikutip dari Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), berikut Tabel 1 adalah matrik indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan kategori desa (Anonim, 2023).

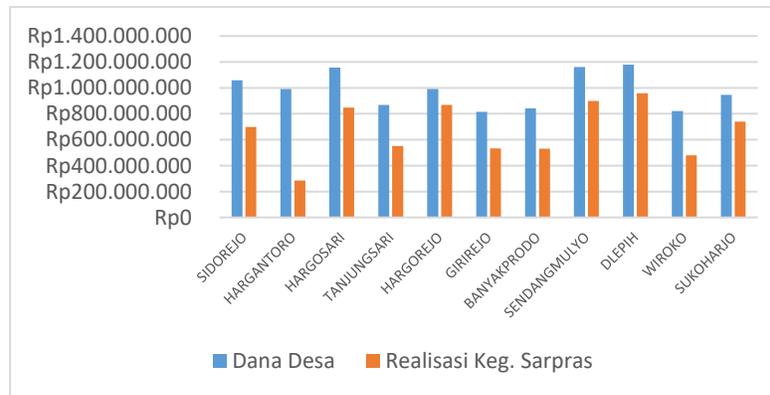
Tabel 1. Penilaian Kategori Desa Berdasarkan IDM

Potensi			Level Pengelolaan Potensi Desa	Nilai IDM	Kategori
Sosial	Ekonomi	Ekologi			
Rentan	Rentan	Rentan	Tidak dapat mengelola	$IDM \leq 0,4907$	Sangat Tertinggal
Ada	Ada	Ada	Pengelolaan belum atau kurang dilakukan dan masih banyak yang miskin	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$	Tertinggal
Ada	Ada	Ada	Pengelolaan belum optimal untuk kesejahteraan masyarakat	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$	Berkembang
Ada	Ada	Ada	Pengelolaan dilakukan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$	Maju
Ada	Ada	Ada	Dapat mengelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan	$IDM > 0,8155$	Mandiri

Penggunaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Tirtomoyo secara umum lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, hampir 95% digunakan untuk infrastruktur dan hanya 5% untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Infrastruktur desa yang dibangun sebagian besar atau 35% digunakan untuk membangun jalan desa. Berikut Gambar 2 adalah realisasi penggunaan anggaran Dana Desa (DD) di Kecamatan Tirtomoyo, diketahui bahwa total anggaran adalah Rp. 10.536.434.000 dengan jumlah realisasi Rp. 7.090.387.080, anggaran tertinggi adalah di Desa Dlepih Rp. 1.178.861.000 dan terendah di Desa Girirejo Rp. 813.903.000, rata-rata realisasi anggaran desa di Kecamatan Tirtomoyo adalah 66,71%,

tertinggi di Desa Hargorejo 87,50% dan terendah di Desa Hargantoro 28,75%.

Kecamatan Tiromoyo, Dana Desa (DD) jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya dalam pembangunan infrastruktur pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa, yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur peningkatan status desa. Studi ini mengamati bagaimana Indeks Desa Membangun (IDM) dan pelaksanaan Undang-Undang Desa berkorelasi dengan pengembangan kemandirian desa, hal ini juga dapat dilihat bagaimana Dana Desa (DD) digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan sistem drainase jalan desa dalam peningkatan status desa. Sehingga nilai tersebut dapat dijadikan



Gambar 2. Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri, 2022

acuan untuk strategi pengembangan dan penggunaan Dana Desa (DD) secara lebih optimal.

Matrik hasil potensi yang dirangkum dalam IDM akan dapat mengarahkan ketepatan dalam pengambilan kebijakan dengan melihat hubungan atau korelasi kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam seluruh tahap pembangunan mulai dari desain atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan swadaya masyarakat, yang tidak bisa lepas dari kondisi topologi dan modal sosial desa.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi kasus ini, yang merupakan jenis penelitian diskripsi kuantitatif, berfokus pada desa-desa di Kecamatan Tirtomoyo. Diharapkan bahwa informasi yang dikumpulkan dari studi kasus ini dapat digunakan untuk memberikan masukan dan pelajaran bagi desa lain (Raharjo, 2017). Penilaian pembangunan infrastruktur desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa berdampak terhadap peningkatan status IDM desa, dalam penelitian ini membandingkan sampel desa berkembang dengan desa maju yang ada di Kecamatan Tirtomoyo, melalui penilaian terhadap; pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, dan pembangunan drainase jalan desa, dilakukan penilaian oleh Tim

Pelaksana Kegiatan/Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa berjumlah masing-masing 10 (sepuluh) orang di dua desa, dilaksanakan dengan tahapan penilaian, sebagai berikut.

1. Proses perencanaan RAB bangunan
2. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan
3. Evaluasi hasil pengawasan kegiatan pembangunan
4. Pendataan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status desa berkembang dan desa maju di Kecamatan Tirtomoyo.

Penilaian hasil pembangunan infrastruktur desa menggunakan form penilaian bangunan desa, sehingga digunakan form penilaian infrastruktur bangunan. Metode evaluasi menggunakan analisis penilaian untuk mengevaluasi hubungan nilai status IDM Desa dengan penilaian infrastruktur desa. Analisis ini mencakup identifikasi Hipotesis (H0) dan Hipotesis (H1), penetapan Taraf Signifikansi ( $\alpha$ ), uji statistik, penetapan kriteria keputusan, kalkulasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan tahapan pada Tabel 2.

Analisis multivariat digunakan dalam perhitungan ini untuk menentukan pengaruh faktor 1 dan 2 terhadap jenis infrastruktur, status IDM desa, dan interaksi antara jenis infrastruktur dan status desa. Perhitungan dilakukan dengan *software* SPSS.

Tabel 2. Hipotesis Penelitian

Faktor	Hipotesis	$\alpha$	
Pengaruh utama Faktor 1 (Penilaian Status Desa)	$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ $H_1 : \exists \alpha_i \neq 0, i=1, 2, 3$	Faktor 1 tidak berpengaruh terhadap Faktor 2 Faktor 1 berpengaruh terhadap Faktor 2	1 0.05
Pengaruh utama Faktor 2 (Infrastruktur Desa)	$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ $H_1 : \exists \beta_i \neq 0, i = 1, 2$	Faktor 2 tidak berpengaruh terhadap penilaian kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) Faktor 2 berpengaruh terhadap penilaian kemampuan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan)	2 0.05

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri sebagian besar berfokus pada pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan, dan drainase desa. Dalam studi ini, penamaan variabel mengikuti aturan Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Variabel Penelitian

Kriteria	Variabel	Keterangan
Penilaian infrastruktur desa (Faktor 2)	A1	Bangunan jalan desa
	A2	Bangunan jembatan desa
	A3	Bangunan drainase desa
Indeks Desa Membangun (IDM) (Faktor 1)	B1	Desa Sidorejo dengan IDM desa Berkembang
	B2	Desa Hargorejo dengan status IDM desa Maju
Tahap pembangunan (Faktor 3)	X1	Aspek Perencanaan RAB
	X2	Aspek Pelaksanaan Pembangunan
	X3	Aspek Pengawasan Pembangunan

Responden yang berjumlah 20 (dua puluh) individu didapatkan dan kemudian dilakukan analisis interaksi hubungan dilakukan pada setiap penilaian jenis infrastruktur bangunan desa untuk menentukan apakah ada perbedaan

antara status IDM desa dan hasil penilaian infrastruktur bangunan jalan desa.

#### 1. Data anggaran infrastruktur

Tabel 4 menunjukkan anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo, dimana total anggaran adalah Rp. 1.057.385.000, variabel penilaian infrastruktur pada studi ini adalah pembangunan jalan dan jembatan (anggaran Rp. 373.685.400, bobot 35%) dan sistem drainase (anggaran Rp. 325.000.000, bobot 31%), yang merupakan komponen utama pembangunan desa. Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) di Desa Sidorejo adalah salah satu contohnya.

Tabel 4. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sidorejo Tahun 2022

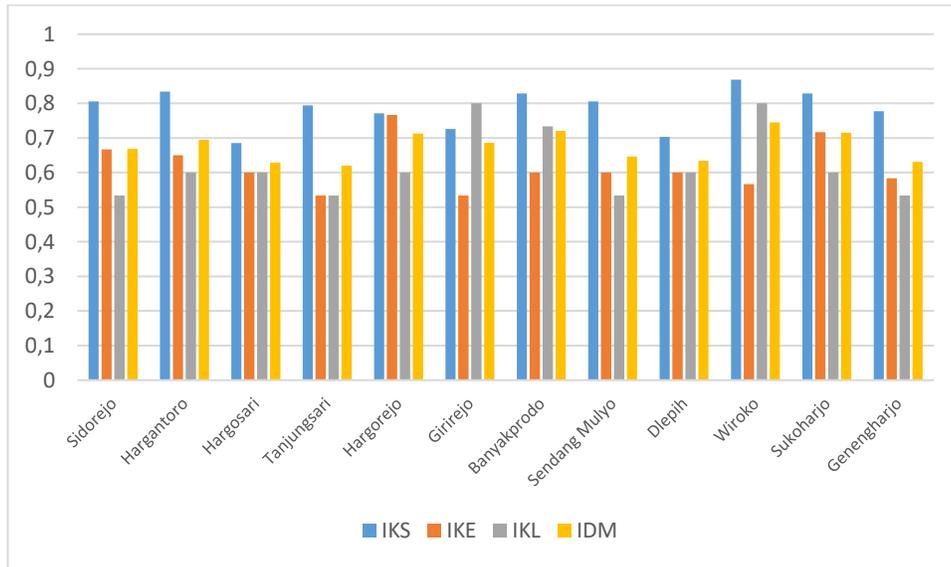
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	BOBOT
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa	373.685.400	35%
Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan	130.000.000	12%
Pembangunan Saluran Drainase	325.000.000	31%
Pembangunan Talud	188.509.600	18%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11.038.000	1%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	29.152.000	3%
Jumlah	1.057.385.000	100%

Sumber: APBDES Desa Sidorejo, Tirtomoyo (2022)

#### 2. Data IDM Desa

Hasil penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Desa di Kecamatan Tirtomoyo dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3 menjelaskan bahwa, hanya ada dua kategori status desa di Kecamatan Tirtomoyo, yaitu Desa Berkembang sejumlah 8 desa: Sidorejo (IDM=0,669),



Gambar 3. Penilaian status IDM desa di Kecamatan Tirtomoyo

Hargantoro (IDM=0,695), Hargosari (IDM=0,629), Tanjungsari (IDM=0,620), Girirejo (IDM=0,686), Sendang Mulyo (IDM=0,646), Dlepih (IDM=0,634), dan Genengharjo (IDM=0,631) serta Desa Maju berjumlah 4 desa: Hargorejo (IDM=0,713), Banyakprodo (IDM=0,721), Wiroko (IDM=0,745), Sukoharjo (IDM=0,715), dan selanjutnya dilakukan analisis hubungan antara penilaian dan pengembangan infrastruktur desa.

3. Data hasil penilaian TPK

Tabel 5 menguraikan hasil penilaian terhadap infrastruktur desa yang dilakukan oleh 20 responden tim TPK desa terkait hubungan antar variabelnya.

Tabel 5. Data hasil penilaian infrastruktur desa oleh TPK desa di Kecamatan Tirtomoyo

Faktor 1	Faktor 2 dan Faktor 3											
	(A1)				(A2)				(A3)			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B1	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	0	4	0	7	4	4	5	2	2			

	7	7	7	7	8	8	7	7	7
	0	1	1	5	0	0	7	3	3
	7	7	7	7	7	7	7	7	8
	1	4	1	5	3	6	9	1	0
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	0	4	4	5	7	7	3	3	3
	7	7	7	7	7	7	6	7	6
	2	1	2	4	5	4	7	5	7
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	3	0	0	5	5	5	5	2	2
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	1	4	1	9	8	9	8	5	8
	6	7	7	8	8	8	7	8	8
	5	2	2	5	2	2	4	0	0
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	0	3	0	5	8	5	2	0	2
	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	1	1	1	6	7	6	1	3	1
B2	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	3	3	3	5	6	5	4	1	4
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	5	5	5	2	5	5	5	4	4
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	5	8	5	3	7	3	4	8	4
	9	8	8	8	8	8	8	8	8
	0	7	7	3	4	4	3	5	5
	8	8	8	8	8	8	8	9	8
	3	4	3	8	3	8	4	0	4
	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	5	2	2	5	9	9	3	4	4
	8	8	8	8	9	8	8	8	8
	8	3	8	3	0	3	2	7	2
	9	8	8	9	8	8	9	8	8
	0	2	2	5	3	3	5	5	5

8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	1	4	2	8	2	2	2	2	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	4	4	4	5	5	2	1	2	2

(X1, X2, X3) pada faktor 2 (A1, A2, dan A3). Tabel 6 menyajikan hasil rekap rerata baris rerata untuk Faktor 2 dan Faktor 1.

Data penilaian tim TPK pada Tabel 5 kemudian dihitung reratanya setiap faktor 3

Tabel 6. Rerata hasil penilaian infrastruktur desa oleh TPK desa di Kecamatan Tirtomoyo

Faktor 1 (Status Desa)	Faktor 2 (Jenis Infrastruktur)									Rata-rata baris		
	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)	(A1)
B1	X1 70,30	X2 71,40	X3 71,20	X1 76,60	X2 76,90	X3 76,80	X1 74,10	X2 73,40	X3 73,80	X1 73,67	X2 73,90	X3 73,93
B2	85,70	83,90	84,30	85,00	86,00	84,70	84,40	84,70	83,60	85,03	84,87	84,20
Rerata	78,00	77,65	77,75	80,80	81,45	80,75	79,25	79,05	78,70	79,35	79,38	79,07

4. Hasil Input Data

Hasil analisis dan pengolahan data menggunakan program SPSS di Kecamatan Tirtomoyo terkait interaksi hubungan penilaian dengan

pengembangan infrastruktur desa dengan status desanya masing-masing pada kategori desa berkembang dan maju, masing-masing ditunjukkan dalam Tabel 7, 8, dan 9 berikut.

Tabel 7. Matrix antar Faktor

		Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan	
Hypothesis	Intercept	Perencanaan	396418.817	395687.267	394142.883
		Pelaksanaan	395687.267	394957.067	393415.533
		Pengawasan	394142.883	393415.533	391880.017
	Status_IDM_Desa	Perencanaan	843.750	840.000	761.250
		Pelaksanaan	840.000	836.267	757.867
		Pengawasan	761.250	757.867	686.817
	Jenis_Infrastruktur	Perencanaan	504.033	464.233	438.067
		Pelaksanaan	464.233	445.233	411.667
		Pengawasan	438.067	411.667	384.533
Status_IDM_Desa * Jenis_Infrastruktur	Perencanaan	703.300	499.500	583.800	
	Pelaksanaan	499.500	362.233	417.533	
	Pengawasan	583.800	417.533	485.733	
Error	Perencanaan	539.100	28.000	120.000	
	Pelaksanaan	28.000	373.200	114.400	
	Pengawasan	120.000	114.400	209.900	

Based on Type III Sum of Squares

Tabel 8. Matrix Residu antar Faktor

		Perencanaan	Pelaksanaan	Pengawasan
Sum-of-Squares and Cross-Products	Perencanaan	539.100	28.000	120.000
	Pelaksanaan	28.000	373.200	114.400
	Pengawasan	120.000	114.400	209.900
Covariance	Perencanaan	9.983	.519	2.222
	Pelaksanaan	.519	6.911	2.119
	Pengawasan	2.222	2.119	3.887
Correlation	Perencanaan	1.000	.062	.357

	Pelaksanaan	.062	1.000	.409
	Pengawasan	.357	.409	1.000

Based on Type III Sum of Squares

Tabel 9. Matrix Hasil Multivariant

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	1.000	40452.411 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Wilks' Lambda	.000	40452.411 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Hotelling's Trace	2333.793	40452.411 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Roy's Largest Root	2333.793	40452.411 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
Status_IDM_Desa	Pillai's Trace	.818	77.975 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Wilks' Lambda	.182	77.975 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Hotelling's Trace	4.499	77.975 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
	Roy's Largest Root	4.499	77.975 <sup>b</sup>	3.000	52.000	.000
Jenis_Infrastruktur	Pillai's Trace	.737	10.303	6.000	106.000	.000
	Wilks' Lambda	.279	15.471 <sup>b</sup>	6.000	104.000	.000
	Hotelling's Trace	2.525	21.461	6.000	102.000	.000
	Roy's Largest Root	2.502	44.203 <sup>c</sup>	3.000	53.000	.000
Status_IDM_Desa * Jenis_Infrastruktur	Pillai's Trace	.759	10.798	6.000	106.000	.000
	Wilks' Lambda	.251	17.270 <sup>b</sup>	6.000	104.000	.000
	Hotelling's Trace	2.947	25.050	6.000	102.000	.000
	Roy's Largest Root	2.934	51.833 <sup>c</sup>	3.000	53.000	.000

a. Design: Intercept + Status\_IDM\_Desa + Jenis\_Infrastruktur + Status\_IDM\_Desa \* Jenis\_Infrastruktur

b. Exact statistic

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Dari perhitungan pada Tabel 7 sampai dengan 9, diketahui bahwa.

- a. Faktor infrastruktur (Faktor 2): nilai uji pillai's trace, wilks' lamda, dan hotelling's trace, dan roy's largest root masing-masing adalah:  $F=10.303$ ;  $F=15.471$ ;  $F=21.461$ ; dan  $F=44.203$ , dengan semua nilai  $\text{sig.} = 0.000 < \alpha = 0,05$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak, artinya faktor infrastruktur berpengaruh terhadap penilaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada desa berkembang dan maju. Dari hasil penilaian dapat diketahui bahwa antara desa berkembang dan maju memiliki perbedaan disemua infrastruktur desa, dimana jarak paling tinggi ada pada infrastruktur jalan.
- b. Faktor status desa (Faktor 1): nilai uji pillai's trace, wilks' lamda, dan hotelling's trace, dan roy's largest root memiliki nilai yang sama yaitu  $F=77.975$  dengan semua nilai  $\text{sig.} = 0.000 < \alpha = 0,05$ , maka hipotesis  $H_0$

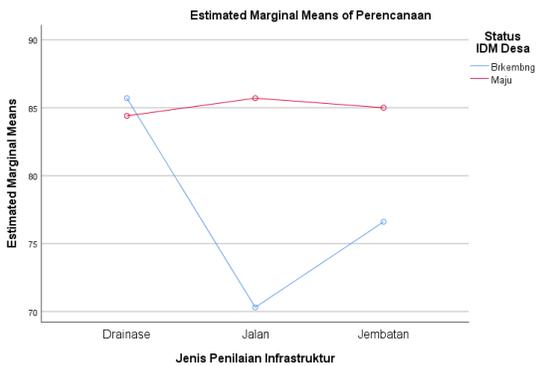
ditolak, artinya faktor status IDM desa berpengaruh berpengaruh terhadap penilaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap tahapan memiliki ukuran nilai yang lebih tinggi pada status desa yang IDMnya tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa desa maju dianggap dapat mengoptimalkan pembangunan di setiap tahapan.

- c. Interaksi hubungan antar faktor: nilai uji pillai's trace, wilks' lamda, dan hotelling's trace, dan roy's largest root memiliki nilai masing-masing:  $F=10.798$ ;  $F=17.270$ ;  $F=25.050$ ; dan  $F=51.833$  dengan semua nilai  $\text{sig.} = 0.000 < \alpha = 0,05$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak yang artinya faktor jenis infrastruktur (Faktor 2) dan status IDM desa (Faktor 1) saling berhubungan dan berpengaruh terhadap penilaian perencanaan, penilaian pelaksanaan, dan penilaian pengawasan infrastruktur desa.

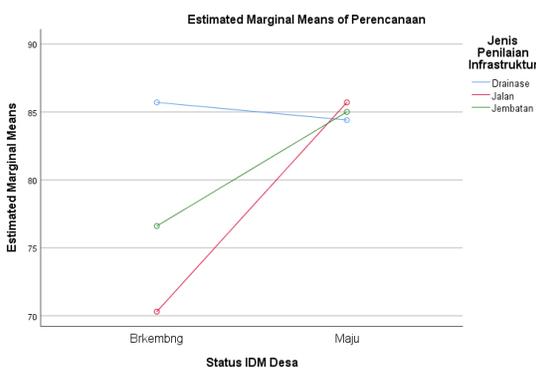
5. Grafik Hubungan antar Faktor  
Setelah seluruh faktor dihitung nilai uji pillai's trace, wilks' lamda, hotelling's trace, dan roy's largest root, dan nilai signifikasinya mengidentifikasi terdapat hubungan antar faktornya, maka dapat dicari pola hubungannya dalam grafik berikut ini.

a. Hubungan antara perencanaan (RAB) dengan jenis infrastruktur dan status desa

Grafik penilaian pada tahap perencanaan (RAB) (Gambar 4 dan 5) menunjukkan hubungan *pengaruh* pada jenis penilaian infrastruktur (drainase, jalan, dan jembatan) dan status IDM desa.



Gambar 4. Hubungan antara RAB dan Jenis Infrastruktur



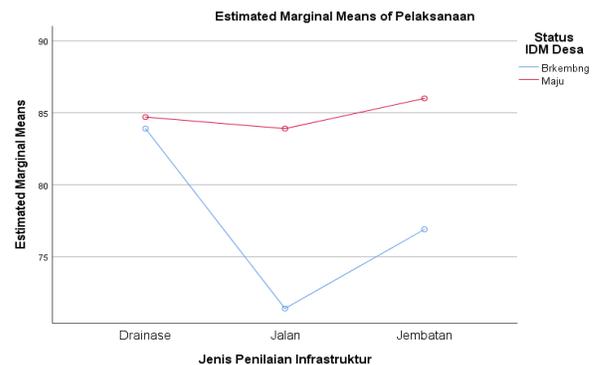
Gambar 5. Hubungan antara RAB dan Status IDM Desa

Gambar 4 dan 5 memberikan pengertian bahwa pada tahap perencanaan, desa dengan kategori

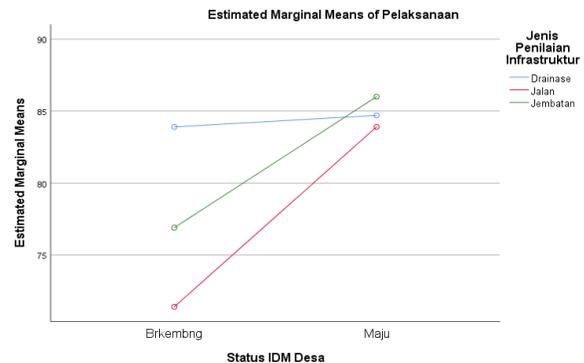
maju jika dibandingkan dengan desa kategori berkembang memiliki hasil penilaian yang lebih tinggi untuk jenis infrastruktur jalan dan jembatan (Gambar 4: garis merah berada di atas garis biru dan Gambar 5: garis naik). Nilai *gap* atau selisih terbesar pada infrastruktur jalan dan disusul dengan jembatan, hal ini mengindikasikan pada desa maju memiliki perencanaan yang baik pada 2 infrastruktur tersebut. Untuk perencanaan drainase menunjukkan selisih yang kecil antara desa maju dan berkembang.

b. Hubungan antara pelaksanaan pembangunan dengan jenis infrastruktur dan status desa

Grafik penilaian pada tahap pelaksanaan (Gambar 6 dan 7) menunjukkan hubungan *pengaruh* pada jenis penilaian infrastruktur (drainase, jalan, dan jembatan) dan status IDM desa.



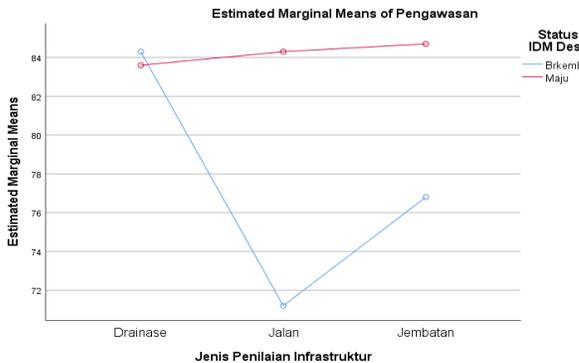
Gambar 6. Hubungan antara Pelaksanaan dan Jenis Infrastruktur



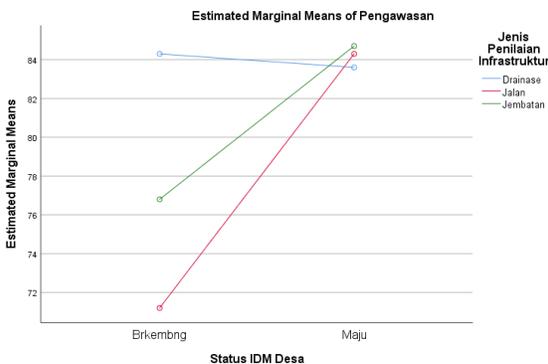
Gambar 7. Hubungan antara Pelaksanaan dan Status IDM Desa

Gambar 6 menunjukkan garis merah berada di atas garis biru dan Gambar 7 menunjukkan semua garis memiliki tren naik menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan, desa dengan kategori maju jika dibandingkan dengan desa kategori berkembang memiliki hasil penilaian yang lebih tinggi untuk jenis seluruh jenis infrastruktur, maka di desa maju pengelolaan pada tahap pelaksanaan dianggap lebih baik daripada desa berkembang.

- c. Hubungan antara pengawasan pembangunan dengan jenis infrastruktur dan status desa  
 Grafik penilaian pada tahap pengawasan (Gambar 8 dan 9) diketahui terdapat hubungan *pengaruh* pada jenis penilaian infrastruktur (drainase, jalan, dan jembatan) dan status IDM desa.



Gambar 8. Hubungan antara Pengawasan dan Jenis Infrastruktur



Gambar 9. Hubungan antara Pengawasan dan Status IDM Desa

Gambar 8 dan 9 memberikan pengertian bahwa pada tahap perencanaan, desa dengan kategori maju jika dibandingkan dengan desa kategori berkembang memiliki hasil penilaian yang lebih tinggi untuk jenis infrastruktur jalan dan jembatan (Gambar 4: garis merah berada di atas garis biru dan Gambar 5: garis naik). Nilai *gap* atau selisih terbesar pada infrastruktur jalan dan disusul dengan jembatan, hal ini mengindikasikan pada desa maju memiliki perencanaan yang baik pada 2 infrastruktur tersebut. Untuk perencanaan drainase menunjukkan selisih yang kecil antara desa maju dan berkembang.

#### 4. KESIMPULAN

Dari data hasil Program SPSS di atas, didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Faktor jenis infrastruktur (Faktor 1) dan faktor status desa (Faktro 2) keduanya memiliki nilai sig. = 0.000 <  $\alpha$  = 0,050 sehingga memiliki hubungan pengaruh dengan penilaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Interaksi hubungan antara Faktor 1 dan Faktor 2 memiliki nilai sig. = 0.000 <  $\alpha$  = 0,050 sehingga kedua faktor tersebut saling berpengaruh terhadap penilaian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
2. Hasil penilaian pada tahap perencanaan (RAB) dan pengawasan, desa maju memiliki penilaian yang lebih tinggi pada 2 infrastruktur (jalan dan jembatan) dan nilai lebih kecil pada infrastruktur drainase tetapi selisihnya tidak banyak dibandingkan dengan desa berkembang, tetapi pada saat tahap pelaksanaan desa maju memiliki penilaian yang lebih tinggi pada 3 infrastruktur (drainase, jalan, dan jembatan) dibandingkan dengan desa berkembang.

## REFERENSI

- Anonim. 2023. "Memahami Maksud Kategori Desa Berkembang, Maju, Mandiri Dan Tertinggal – Top Info." *Berita Desa*.  
<https://www.pedekik.com/memahami-maksud-kategori-desa-berkembang-maju-mandiri-dan-tertinggal/> (September 5, 2023).
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(2), 223.
- BPS.2021. "Kecamatan Tirtomoyo Dalam Angka 2021." *BPS*.  
<https://wonogirikab.bps.go.id/publication/2021/09/24/7185113c176c5b058be76850/kecamatan-tirtomoyo-dalam-angka-2021.html> (November 27, 2023).
- Destifani, I., Suwondo, dan I. Wanusmawatie. (2013). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1239-1246
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Desa. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 121-140.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Kemendesa PDPT. 2023. "IDM: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi." <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm> (November 26, 2023).
- Rahardjo, M. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. UIN Malang.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308-315.
- Subekan, A. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 47-60.  
<https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.11>
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).